

Analisis Kinerja Keuangan Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru.**Yudi Rahman, Fauziannor, Rizalu Mastaqim**

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan melakukan proses perhitungan rasio pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Baritob dan menilai kinerja keuangan dengan menganalisis dari hasil perhitungan rasio pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan menggunakan Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Belanja, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi serta Rasio Keserasian.

Hasil analisis pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru selama lima tahun berturut-turut yaitu pada periode 2016-2021. Menyatakan bahwa Efektivitas Kinerja Keuangan dikategorikan Efektif dan menunjukkan bahwa kinerja keuangan tergolong baik dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Tingkat efisiensi anggaran belanja tergolong sangat baik karena pada tahun 2016-2018 memiliki kriteria efisien dan tahun 2019-2020 memiliki kriteria sangat efisien. Rata – rata rasio belanja operasi lebih besar dari rasio belanja modal artinya dana diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi hal ini menunjukkan bahwa dana lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasi Belanja Operasi, Rasio, Rasio Belanja Modal, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh Negara menjadi momok baik dari segi kesehatan maupun ekonomi suatu negara. Berdasarkan data World Health Organisation (WHO), usia rentan penderita virus covid-19 ini berada di usia dewasa, dan 70% dialami di usia 31 hingga 45 tahun. Oleh karena itu, Negara yang memiliki demografi dengan usia diatas 65 tahun yang berlimpah akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi pandemi ini. Sebaliknya, Negara yang memiliki demografi dengan usia produktif yang lebih besar akan mudah menghadapi situasi pandemic covid-19 ini, terutama dari segi ekonomi. Dampak pandemi virus covid-19 ini memaksa pemerintah pusat ataupun daerah untuk mencari cara agar perekonomian tidak terlalu tertekan akibat daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi tersebut. Sistem kenormalan baru menjadi salah satu solusi paling nyata untuk membuat status Perekonomian tidak terlalu tertekan. Di kantor balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung barito dimasa pandemic sistem kerja pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga beberapa pegawai ada yang bekerja dirumah (Work From Home) dan sebagian dikantor (Work From Office), namun dengan adanya pandemic tidak menghalangi kantor balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung untuk melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya realisasi anggaran.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

yang di dalamnya terdapat Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang sangat penting bagi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran yang telah disusun harus dianalisis sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pengguna anggaran. Informasi laporan realisasi anggaran ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini yang kemudian akan dipindahkan ke neraca kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan realisasi anggaran dan SAP dinyatakan dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP No. 2 ini berisikan mengenai realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fenomena Permasalahan yang peneliti temukan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito adalah terkait perencanaan yang belum sesuai dengan realisasi dari tahun 2016 – 2020, yaitu adanya permasalahan dalam hal perencanaan program kegiatan yang diduga masih belum efektif dikarenakan terjadi fluktuasi anggaran dan realisasi tidak mencapai target anggaran pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran pada

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	27,602,321,000	21,629,151,149
2017	30,150,319,000	27,120,410,916
2018	22,347,549,000	22,121,899,738
2019	109,776,508,000	108,195,219,389
2020	85,638,746,000	84,616,158,342

Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Barito (2021)

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito pada tahun 2016-2020, dari laporan Realisasi anggaran pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito maka dapat diketahui kinerja keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito. tentu saja laporan keuangan Balai perlu di analisis lebih lanjut untuk menilai kinerja keuangan secara lebih menyeluruh apakah dalam kondisi baik atau buruk menggunakan metode analisis rasio keuangan yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis akan merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perhitungan rasio pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito ?

2. Bagaimana kinerja keuangan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berdasarkan hasil analisis rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan rasio pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito selama ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berdasarkan analisis rasio keuangan.

1.4 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka batasan dalam penelitian ini adalah melakukan proses pengkajian dan analisis terhadap kinerja keuangan terhadap kinerja keuangan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito periode 2016-2020 menggunakan metode analisis rasio keuangan yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian.

1.5 Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan 3 aspek manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Aspek Akademis.

Dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan terutama pada mata kuliah akuntansi keuangan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam organisasi pemerintahan terkait kinerja pengelolaan anggaran.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai khasanah pengembangan dan implementasi terhadap keilmuan khususnya bidang akuntansi keuangan khususnya tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Aspek Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito dalam hal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dimasa yang akan datang.

sama sektor publik dan swasta. Tujuan akuntansi sektor publik yaitu:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi pimpinan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memubgkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (2014:138) akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut: akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang bernalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang antara lain akuntansi sektor publik. Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja

2.2 Pengertian Anggaran

Aspek-aspek anggaran yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, aspek akuntabilitas publik. Dari sisi perencanaan, anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi publik tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakatnya, tetapi tidak

jarang bahwa organisasi publik mendapatkan hambatan yang umumnya dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki.

2.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan sebuah arahan atau pengendalian yang sistematis atau proses yang mengubah input menjadi sebuah barang dan jasa. Dengan kata lain yang dimaksud dengan realisasi anggaran adalah tindak lanjut dari rencana kerja yang telah dianggarkan sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam APBN. Realisasi anggaran akan tertuang dalam laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disebut dengan LRA merupakan laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar merinci lebih lanjut angka-

angka yang diperlukan diberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

1. Pendapatan
Merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja
Merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer
Merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Surplus / Defisit
Merupakan selisih lebih / kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
5. Pembiayaan
Pembiayaan (financing) merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran
Adalah selisih lebih / kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN / APBD selama satu periode pelaporan.

2.4 Laporan pertanggung Jawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan laporan rencana dan informasi akuntansi yang sebenarnya mengenai masukan dan keluaran dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan efektivitas dari penyampaian laporan pertanggungjawaban, maka menurut Mahsun (2014:17) laporan pertanggungjawaban harus mempunyai karakteristik pokok sebagai berikut:

1. Laporan harus sesuai dengan bagan organisasi yaitu harus ditujukan pada individu yang bertanggung jawab untuk mengontrol hal-hal yang dilaporkan.
2. Laporan harus konsisten dalam bentuk dan isi sewaktu setiap kali dilaporkan
3. Laporan harus dikeluarkan secara tepat waktu
4. Laporan harus dikeluarkan secara berkala dan teratur guna meningkatkan kegunaan dari laporan tersebut.
5. Laporan harus mudah dimengerti
6. Laporan harus memuat cukup detail tetapi tidak berlebihan
7. Laporan harus memberikan angka perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dan menerangkan penyimpangan kalau ada.
8. Laporan harus bersifat analisis menerangkan penyebab terjadinya penyimpangan

9. Laporan untuk manajemen operasional harus dinyatakan sebaik mungkin dalam unit fisik seperti di dalam nilai mata uang, karena informasi dalam bentuk mata uang mungkin tidak relevan bila digunakan oleh supervisor.

2.5 Kinerja Anggaran Belanja

Kinerja anggaran belanja pemerintah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syamsi (2014:99) ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri :

1. Kemampuan struktural organisasinya
Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah

tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Halim (2014:264) salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah:

1. Rasio Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), dan efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Mahmudi (2007) mengatakan efektifitas terkait dengan

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Pengukuran Rasio Efektifitas

Persentase (%)	Rasio Efektifitas
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
75 % - 89 %	Cukup Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber : Halim (2014)

2. Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2009), efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total anggaran

belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Tabel 2.3
Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase (%)	Rasio Efisiensi
>100 %	Tidak efisien
90 % - 100 %	Cukup Efisien
75 % - 89 %	Efisien
< 75 %	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2014)

3. Rasio Keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan baik. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2014:269) semakin tinggi *persentase* dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian antara lain berupa:

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi

dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu belanja modal juga tidak bersifat rutin. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Pramono tahun 2014 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta” dalam penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut : Kinerja keuangan pemerintah kota surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83% (2010) dan 24,44% (2011). Sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Tingkat Efisiensi dan efektifitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif.
2. Widya Susanti tahun 2016 dengan judul Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang data pada laporan realisasi anggaran dan APBD tiap-tiap program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode rasio keuangan selama 3 tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan, rasio efisiensi selama 3 tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi dan rasio efektivitas selama 3 tahun terjadi fluktuasi. Persamaan dari penelitian ini yaitu yaitu mengukur kinerja anggaran. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu hanya menggunakan rasio efisien dan efektifitas sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menggunakan rasio rasio efisien dan efektifitas melainkan menggunakan rasio pertumbuhan, desentralisasi, keserasian, pertumbuhan, kemandirian.
3. Kristanto (2014) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Klaten” dalam penelitiannya menyimpulkan

berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah selama 3 tahun masih diantara 0-25% tergolong dalam pola hubungan instruktif berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relative rendah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan sangat tinggi.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan. Dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito apabila ditinjau melalui analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.

3.2 Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis Data

1. Data kualitatif, yaitu data yang didapat dari hasil observasi langsung wawancara dengan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi
2. Data kuantitatif, yaitu data yang didapat dari dokumen Keuangan yaitu laporan keuangan periode tahun anggaran 2016 - 2020 serta data pendukung lainnya.

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber yang menjadi

4. Assidqi (2014) dengan judul : “ Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dalam penelitiannya menyimpulkan Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Belanja daerah Pemerintah kabupaten Klaten Selama tahun 2008 – 2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi sebesar 93,48%.

objek penelitiannya. Data yang bersumber dari wawancara, pengamatan suatu peristiwa, orang dan objek. Data yang bersumber secara primer ini diperoleh secara langsung dari bagian yang terkait dalam masalah penelitian ini.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian buku-buku / *literature* dan dokumen-dokumen keuangan dan data pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian dan data-data tersebut diperoleh dengan cara:

1. Pengamatan (*Observasi*) yaitu mengadakan peninjauan langsung ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru yang berhubungan dengan pokok permasalahan, data yang diperoleh berupa laporan keuangan 2016-2018 serta data pendukung lainnya.

2. Wawancara (*Interview*) yaitu untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab kepada Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru.
3. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data yang berhubungan dengan dokumen, catatan, serta laporan yang telah terjadi yang sesuai dengan masalah.

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mengumpulkan data-data sekunder untuk dijadikan ringkasan-ringkasan pada penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pengukuran kinerja keuangan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru menggunakan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Efektifitas

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektifitas adalah :

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Pembahasan

4.1 Perhitungan Rasio pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian antara lain berupa:

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Pengukuran rasio-rasio tersebut di kelompokkan sebagaimana tertulis pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian

Rasio	Kriteria		
	Efektivitas	Efisiensi	Keserasian
>100%	Sangat efektif	Tidak efisien	Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi dan belanja modal.
90%-100%	Efektif	Cukup Efisien	
75%-89%	Cukup efektif	Efisien	
< 75 %	Tidak efektif	Sangat Efisien	

Sumber: Halim (2014)

keuangan dari 2016 – 2020. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Adapun hasil dari perhitungan rasio tersebut sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran . Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Balai PDASH Lindung Barito

Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)
2016	27,602,321,000	21.629.151.149
2017	30,150,319,000	27,120,410,916
2018	22,347,549,000	22,121,899,738
2019	109,776,508,000	108,195,219,389
2020	85,638,746,000	84,616,158,342

Sumber : Data diolah, 2021

Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.2

Perhitungan ratio Efektivitas

Thn	Perhitungan ratio	Persen
2016	$\frac{21.629.151.149}{27.602.321.000} \times 100\%$	78,36%
2017	$\frac{27.120.410.916}{30.150.319.000} \times 100\%$	89,95%
2018	$\frac{22.121.899.738}{22.347.549.000} \times 100\%$	98,99%
2019	$\frac{108.195.219.389}{109.776.508.000} \times 100\%$	98,56%
2020	$\frac{84.616.158.342}{85.638.746.000} \times 100\%$	98,81%

Sumber : Data diolah, 2021

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Tabel 4.3

Rasio efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Laporan Realisasi Anggaran pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Lindung Barito

Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)
2016	27,602,321,000	23.620.151.144
2017	30,150,319,000	25,122,410,116
2018	22,347,549,000	17,221,889,738
2019	109,776,508,000	80,201,212,289
2020	85,638,746,000	60,617,152,542

Sumber : Diolah, 2021

Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.4

Perhitungan ratio Efisiensi

Tahun	Perhitungan ratio	Persen
2016	$\frac{23.620.151.144}{27.602.321.000} \times 100\%$	85,57%
2017	$\frac{25.122.410.116}{30.150.319.000} \times 100\%$	83,32%
2018	$\frac{17.221.889.738}{22.347.549.000} \times 100\%$	77,06%
2019	$\frac{80.201.212.289}{109.776.508.000} \times 100\%$	73,06%
2020	$\frac{60.617.152.542}{85.638.746.000} \times 100\%$	70,78%

Sumber: Data Diolah, 2021

2. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dihitung dengan cara membandingkan total belanja operasi dengan total belanja dan total belanja modal dengan total belanja. Rasio Keserasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio keserasian antara lain berupa:

- a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

- b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Laporan Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Operasi pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Sebagai berikut :

Tabel 4.5

Laporan Realisasi Belanja dan Belanja Operasi pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)
2016	14.730.128.667	21.629.151.149
2017	20.818.625.334	27,120,410,916
2018	16.157.195.128	22,121,899,738
2019	99.236.203.443	108,195,219,389
2020	80.087.647.270	84,616,158,342

Sumber : Data diolah, 2021

Perhitungan Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Perhitungan Ratio Belanja Operasi

Thn	Perhitungan ratio	Persen
2016	$\frac{14.730.128.667}{21.629.151.149} \times 100\%$	68,10%
2017	$\frac{20.818.625.334}{27.120.410.916} \times 100\%$	76,76%

	27.120.410.916	
2018	$\frac{16.157.195.128}{22.121.899.738} \times 100\%$	73,04%
2019	$\frac{99.236.203.443}{108.195.219.289} \times 100\%$	91,72%
2020	$\frac{80.087.647.270}{84.616.158.342} \times 100\%$	94,65%

Sumber: Data Diolah, 2021

Laporan Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Modal pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Sebagai berikut :

Tabel 4.7

Laporan Realisasi Belanja dan Belanja Modal pada Balai PDASH Lindung Barito

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)
2016	724.514.486	21.629.151.149
2017	392.312.000	27,120,410,916
2018	91.892.220	22,121,899,738
2019	3.572.437.383	108,195,219,389
2020	181.529.800	84,616,158,342

Sumber :Data diolah, 2021

Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2016 – 2020 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.8

Perhitungan ratio Belanja Operasi

Tahun	Perhitungan ratio	Persen
2016	$\frac{72.451.486}{21.629.151.149} \times 100\%$	0,33%
2017	$\frac{392.312.000}{27.120.410.916} \times 100\%$	1,45 %
2018	$\frac{91.892.220}{22.121.899.738} \times 100\%$	0,42%
2019	$\frac{3.572.437.383}{108.195.219.289} \times 100\%$	3,30%
2020	$\frac{181.529.800}{84.616.158.342} \times 100\%$	0,21%

Sumber: Data Diolah, 2021

4.2 Hasil Analisis Rasio Keuangan Pada Balai Pengelolaan DASHL Barito

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan dari 2016 – 2020. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Tabel 4.9

Rasio Efektivitas Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Th n	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Target Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2016	21.629.151.149	27.602.321.000	78,36 %	Cukup Efektif
2017	27.120.410.916	30.150.319.000	89,95 %	Cukup Efektif
2018	22.121.899.738	22.347.549.000	98,99 %	Efektif
2019	108.195.219.389	109.776.508.000	98,56 %	Efektif
2020	84.616.158.342	85.638.746.000	98,81 %	Efektif

Sumber : (Data diolah, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito pada tahun 2016 sebesar 78,36 %, Hasil ini menunjukkan bahwa ditahun 2016 masuk dalam kriteria cukup efektif hal ini dikarenakan kantor balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung barito dalam melakukan penyerapan belum optimal, di tahun 2017 tingkat efektifitas mengalami peningkatan sebesar 89,95 %, pada tahun 2018 tingkat efektifitas mengalami kenaikan sebesar 98,99 %, pada tahun 2019 tingkat efektifitas agak sedikit menurun menjadi 98,56% hal ini dikarenakan pandemi covid 19

membuat kantor balai pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung barito lockdown sehingga ada beberapa perjalanan dinas yang tidak terealisasikan, dan di tahun 2020 tingkat efektifitas kembali meningkat sebesar 98,81%. Efektivitas Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung barito untuk tahun 2018 – 2020 dikategorikan Efektif. Karena Nilai diperoleh diatas 90%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Efektif karena rata – rata efektifitasnya diatas 90% yaitu 92,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito tergolong baik dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Norma (2020) yang melakukan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2016 – 2018 berjalan dengan baik atau sangat efektif . Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektifitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target. Sama terjadi di penelitian ini Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berjalan dengan baik atau efektif karena efektifitasnya meningkat tiap tahunnya.

2. Rasio Efisiensi

Tabel 4.10

Rasio Efisiensi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Th n	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Rasio Efisie nsi	Kriter ia
201 6	27,602,321,0 00	23.620.151. 144	85,70 %	Efisie n
201 7	30,150,319,0 00	25.122.410. 116	83,32 %	Efisie n
201 8	22,347,549,0 00	17.221.889. 738	77,06 %	Efisie n
201 9	109,776,508, 000	80.201.212. 289	73,06 %	Sangat Efisie n
202 0	85,638,746,0 00	60.617.152. 542	70,78 %	Sangat Efisie n

Sumber :Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Efisiensi dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar 85,70 % menjadi 83,32% di tahun 2017, Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dipandang sebagai peningkatan tingkat efisiensi dan masuk dalam kriteria efisien, pada tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 77,06% hal ini tingkat efisiensi makin meningkat tetapi masih masuk dalam kriteria efisien, di tahun 2019 efisiensi kembali meningkat sebesar 73,06%, dan tahun 2020 tingkat efisiensi meningkat sebesar 70,78%. Tingkat efisiensi anggaran belanja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito sudah sangat bagus, dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2020 Anggaran Belanja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito memiliki kriteria yang efisien dan pada tahun 2019 dan 2020 yang memiliki kriteria sangat efisien. Dalam menghitung tingkat efisiensi, berpatokan pada hal biaya. Dimana, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan didalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input

yang dapat mengacu pencapaian tujuan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito, faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan dimasukkan dalam anggaran belanja langsung. Sesuai dengan pengertian dari efisiensi yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui beberapa program yang telah dijalankannya. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito telah berhasil menggunakan dana yang kecil untuk menjalankan beberapa program dan bisa mencapai hasil yang maksimal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggara Z Harahap (2018) yang melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011 – 2015 berjalan kurang efisien . Hal ini terjadi karena tingginya rasio efisiensi yang ditentukan dari perbandingan antara pendapatan dengan realisasi belanja. Sama hal nya terjadi di penelitian ini Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito kurang efisien.

3. Rasio Keserasian

Tabel 4.11

Rasio Belanja Operasi Balai Pengelolaa Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Tahu n	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operas i
2016	21.629.151.149	14.730.128.66 7	68,10 %
2017	27,120,410,916	20.818.625.33 4	76,76 %
2018	22,121,899,738	16.157.195.12 8	73,04 %
2019	108,195,219,38	99.236.203.44	91,72 %

	9	3	
2020	84,616,158,342	80.087.647.270	94,65%

Sumber : Data diolah, 2021.

Tabel 4.12
Rasio Belanja Modal Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal
2016	21.629.151.149	72.451.486	0,33 %
2017	27,120,410,916	392.312.000	1,45 %
2018	22,121,899,738	91.892.220	0,42 %
2019	108,195,219,389	3.572.437.383	3,30 %
2020	84,616,158,342	181.529.800	0,21 %

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 Perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito pada tahun 2016 sebesar 68,10 %, tahun 2017 sebesar 76,76 %, tahun 2018 sebesar 73,04 %, tahun 2019 sebesar 91,72%, dan tahun 2020 sebesar 94,65%. Sedangkan Rasio Belanja Modal Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berdasarkan tabel 4.8 pada tahun 2016 sebesar 0,33 %, tahun 2017 sebesar 1,45 %, tahun 2018 sebesar 0,42 %, tahun 2019 sebesar 3,30%, dan tahun 2020 sebesar 0,21%. Dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi dan rasio belanja modal yang belum stabil dari tahun ke tahun.

Menurut uraian dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito masih di prioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi relatif kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari rata – rata rasio belanja operasi yang masih jauh lebih besar di dibandingkan dengan rata- rata rasio belanja modal. Besarnya dialokasi dana untuk belanja operasi. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

dan Hutan Lindung Barito yang lebih condong pada pengeluaran - pengeluaran rutin.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito dengan menggunakan beberapa rasio, Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil atau di kemukakan, antara lain :

1. Perhitungan Rasio pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

- Perhitungan Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Rasio Efektifitas Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito pada tahun 2016 sebesar 78,36 %, tahun 2017 sebesar 89,95 %, tahun 2018 sebesar 98,99 %, tahun 2019 sebesar 98,56%, dan tahun 2020 sebesar 98,81%.
- Perhitungan Rasio Efisiensi dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar 85,70 % menjadi 83,32% di tahun 2017, Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dipandang sebagai peningkatan tingkat efisiensi dan masuk dalam kriteria efisien, pada tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 77,06% hal ini tingkat efisiensi makin meningkat tetapi masih masuk dalam kriteria efisien, di tahun 2019 efisiensi kembali meningkat sebesar 73,06%, dan tahun 2020 tingkat efisiensi meningkat sebesar 70,78%.
- Perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito pada tahun 2016 sebesar 68,10 %, tahun 2017 sebesar 76,76 %, tahun 2018 sebesar 73,04 %, tahun 2019 sebesar 91,72%, dan tahun 2020 sebesar 94,65%. Sedangkan Rasio Belanja Modal Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito berdasarkan tabel 4.8 pada tahun 2016 sebesar 0,33 %, tahun 2017 sebesar 1,45 %, tahun 2018 sebesar 0,42 %, tahun 2019 sebesar 3,30%, dan tahun 2020 sebesar 0,21%.

2. Hasil Analisis Rasio Keuangan Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

a. Efektivitas Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito untuk tahun 2018 – 2020 dikategorikan Efektif. Karena Nilai diperoleh diatas 90%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Efektif karena rata – rata efektivitasnya diatas 90% yaitu 92,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito tergolong baik dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan.

b. Tingkat efisiensi anggaran belanja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito sudah sangat bagus, dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2020 Anggaran Belanja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito memiliki kriteria yang efisien dan pada tahun 2019 dan 2020 yang memiliki kriteria sangat efisien

c. Dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi dan rasio belanja modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Menurut uraian dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito masih di prioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi relatif kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari rata – rata rasio belanja operasi yang masih jauh lebih besar di dibandingkan dengan rata- rata rasio belanja modal. Besarnya dialokasi dana untuk belanja operasi. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito yang lebih condong pada pengeluaran - pengeluaran rutin.

4.2 Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito harus bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang efektif dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan.
2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito sebaiknya lebih memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sara dan prasarana yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli di bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu diharapkan lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Bahrin, 2014, Analisis Kinerja Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, <http://www.uny.ac.id>>[e-skripsi.htm](http://www.uny.ac.id) diakses pada tanggal 12 April 2019.
- Halim, 2014, Pemerintahan, Andi, Yogyakarta
- Mahmudi, 2007, Analisis Kinerja Anggaran, BFFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Mahsun, 2014, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta
- Syamsi, 2014, Analisis Pengukuran Kinerja Sektor Publik, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sujarweni, 2015, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta
- Widya Susanti, 2016, Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja

Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri